

Menyatukan Langkah, Memajukan Negeri



Diterbitkan oleh:

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
Kantor KNKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C



INSIGHT
Buletin Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah Dunia

INDONESIA

Menjadikan Indonesia
Sebagai Pusat
Ekonomi Syariah Dunia

Quick Wins
KNKS
2019

Masterplan Ekonomi Syariah
INDONESIA 2019-2024

EDISI PERTAMA - JUNI 2019

**1****FOKUS UTAMA**

Profil Komite Nasional Keuangan Syariah

2**FOKUS UTAMA**

Quick Wins KNKS 2019

8**PERSPEKTIF**

Dr Irfan Syauqi Beik - Tokoh Ekonomi Syariah

11**HIGHLIGHT NEWS**

Islamic Economic, Finance and Industry

**FOKUS UTAMA**

Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

5**KABAR KNKS**

Program dan Kegiatan

17**DEWAN REDAKSI****DEWAN PENGARAH KNKS & MANAJEMEN EKSEKUTIF****PIMPINAN UMUM**

Sutan Emir Hidayat

PIMPINAN REDAKSI:

Ginanjar Dewandaru

REDAKTUR PELAKSANA

M. Quraisy

REDAKTUR AHLI

Mohamad Soleh Nurzaman

Sudarmawan Samidi

Umar Adityawarman

Luqyan Tamanni

Ni Putu Desinthy

Jamil Abbas

REDAKSI

Citra Atrina Sari

Achnes Frans

Annissa Permata



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buletin Insight ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini mengalami perkembangan pesat baik dalam tataran global maupun nasional. Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan syariah di beberapa negara menegaskan hal ini. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 87.18 persen dari 232.5 juta jiwa, Indonesia menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut laporan the Global Islamic Economy Index 2018/2019, Indonesia masuk dalam top 10 produsen halal dunia. Sementara sebagai konsumen, Indonesia juga menempati peringkat top 6 misalnya sebagai konsumen pertama makanan halal, ketiga fesyen Muslim, kelima halal travel- halal media dan rekreasi, serta keenam untuk halal farmasi-kosmetik.

Kontrasnya kontribusi peran Indonesia sebagai produsen dibandingkan sebagai konsumen produk halal dunia ini mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong percepatan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan tujuan menempatkan Indonesia dalam top world-league ekonomi syariah dunia.

Salah satu upaya Pemerintah tersebut yaitu diantaranya dengan membentuk KNKS (Komite Keuangan Syariah Nasional). KNKS bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Indonesia.

Alhamdulillah, pada tgl 14 Mei 2019, KNKS telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) sebagai sebuah acuan roadmap pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri, termasuk industri dan sistem keuangan syariah agar mampu memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Literasi masyarakat merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga hadirnya edisi perdana Buletin Insight ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut khususnya sebagai wadah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan terbaru tentang industri ekonomi dan keuangan syariah dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PROFIL KNKS KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH



Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) lahir sebagai mandat dari rekomendasi utama Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang disusun oleh Bappenas tahun 2016. KNKS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS. Kemudian, pada tanggal 27 Juli 2017, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia (RI) meresmikan KNKS di Istana Negara.

KNKS merupakan Lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan sebagai bentuk upaya serius pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah dengan melibatkan para

pemangku kepentingan. KNKS merupakan lembaga yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional.

KNKS diketuai langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, dengan memiliki 10 Anggota Dewan Pengarah yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tugas-tugas harian KNKS selanjutnya dilaksanakan oleh Manajemen Eksekutif yang terdiri dari:

- 1 Ventje Rahardjo Soedigno sebagai Direktur Eksekutif
- 2 Taufiq Hidayat sebagai Direktur Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal.
- 3 Ronald Rulindo sebagai Direktur Inovasi Produk, Pendalam Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah
- 4 Ahmad Juwaini sebagai Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah
- 5 Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah
- 6 Afdhal Aliasar sebagai Direktur Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal.

QUICK WINS

DIREKTORAT KNKS DAN QUICK WINS TAHUN 2019



Taufiq Hidayat

DIREKTORAT HUKUM, PROMOSI DAN HUBUNGAN EKSTERNAL

Direktorat Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal merupakan direktorat yang didirikan khusus dengan tujuan:

- ⇒ Menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- ⇒ Menyiapkan rumusan / rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan keuangan syariah nasional di bidang promosi dan sosialisasi, bidang advokasi dan hubungan kerja sama dalam negeri serta luar negeri
- ⇒ Melaksanakan kajian hukum, penyusunan peraturan landasan hukum, pengembangan hukum, penyelesaian hukum, dan penyuluhan hukum.
- ⇒ Mempromosikan, meng sosialisasikan, serta mengedukasi dari program program tiap direktorat kepada stakeholder
- ⇒ Menjalin hubungan baik dengan seluruh dewan pengarah dan seluruh stakeholder terkait

Program Quickwins di tahun 2019:

- ⇒ Jaminan Sosial Berbasis Syariah (BPJS Syariah)
- ⇒ Mewujudkan lahirnya "Takaful World Class"



Ronald Rulindo

DIREKTORAT INOVASI PRODUK, PENDALAMAN PASAR, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Direktorat Inovasi Produk, Pendalam Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah (Direktorat IPPPPISKS) merupakan direktorat yang didirikan khusus untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Target: Menjadikan industri keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia yang ditandai dengan adanya lembaga keuangan syariah dengan skala besar, produk-produk keuangan syariah Indonesia yang bisa menjadi rujukan dunia, serta tersedianya kerangka pengaturan, prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang teraplikasikan, serta tata kelola syariah yang kuat.

Program Quickwins di tahun 2019:

- ⇒ Menghadirkan Bank Syariah BUMN dengan skala besar
- ⇒ Pendirian Perusahaan Investasi Syariah
- ⇒ Rancangan Undang-Undang Keuangan Syariah

QUICK WINS²⁰¹⁹**DIREKTORAT KNKS DAN
QUICK WINS TAHUN 2019****DIREKTORAT KEUANGAN INKLUSIF, DANA SOSIAL KEAGAMAAN,
DAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH**

Direktorat Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah merupakan direktorat yang didirikan dengan tujuan untuk merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan dan keuangan mikro syariah.

Ahmad Juwaini

Program Quickwins di tahun 2019:

- Mewujudkan platform terpadu zakat nasional dalam bentuk "Platform Zakat"
- Gerakan Indonesia Ramah Zakat
- Mewujudkan tersedianya sistem integrasi data terpusat yang terhubung dalam bentuk "Platform BMT"

**DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN RISET KEUANGAN SYARIAH**

Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah merupakan direktorat yang didirikan dengan tujuan untuk menjembatani kebutuhan terkait pengembangan literasi ekonomi syariah dan industri halal; standardisasi sertifikasi SDM dan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah dari level dasar hingga pendidikan tinggi; pembuatan pusat data ekonomi syariah serta peningkatan kuantitas dan kualitas riset untuk ekonomi syariah dan industri halal. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten merupakan suatu kebutuhan di dalam pengembangan Ekonomi Syariah. Kesiapan SDM yang mumpuni khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah merupakan salah satu modal dasar dalam menghadapi perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan dunia bisnis yang semakin bergerak (volatile), tidak pasti (*uncertainty*), kompleks (*complex*) dan tidak jelas (*ambiguous*) serta kondisi ekonomi yang disruptif (*disruptive*).

Program Quickwins di tahun 2019:

- One Data Center & Knowledge Center
- Buletin Ekonomi Syariah "Insight"

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INDUSTRI HALAL**

Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal merupakan direktorat yang didirikan khusus untuk melakukan koordinasi dan inovasi pada sektor riil dalam ekonomi syariah dan industri halal. Fokus pada direktorat ini terbagi ke dalam 4 strategi utama yaitu; Penguatan Halal Value Chain, Penguatan Keuangan Syariah, Penguatan UMKM, serta Penguatan Ekonomi Digital.

Afdhal Aliasar

Program Quickwins di tahun 2019:

- Mengembangkan "Digital Payment Syariah"
- Menginisiasi pembentukan "Portal Fatwa"
- Mewujudkan lahirnya "Market Place Halal"
- Mengadakan "Survey Nasional Preferensi Halal"



"Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," **Bambang Brodjonegoro**

MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019- 2024



Pada tanggal 14 Mei 2019, Presiden Jokowi meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 sebagai sebuah peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor seperti sektor makanan-minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah.

Hal ini bertujuan agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah dapat memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di sektor rill, yang juga merupakan fokus utama dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Dunia yakni sebesar 232,5 juta jiwa atau mencapai 87,18 persen, potensi perkembangan industri halal di Indonesia semakin besar.

Indonesia termasuk dalam posisi 10 besar konsumen pada setiap sub-sektor industri halal global. Namun, Indonesia belum mampu berperan sebagai "playmaker" atau produsen dalam industri halal. Sehingga, kedepannya peluang untuk mengembangkan sektor-sektor industri halal sangat besar yang kemudian dapat berdampak positif pada perekonomian nasional Indonesia.

Diantaranya, pengembangan produk fesyen halal yang mendukung industri tekstil dan pakaian jadi yang merupakan komoditas unggulan eksport Indonesia, serta promosi travel halal yang sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata yang menjadi penopang neraca

perdagangan jasa Indonesia. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 ini disusun sebagai suatu referensi pengembangan ekonomi syariah agar mampu memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengembangan sektor rill ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal.

Melalui pemahaman yang utuh, identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi semakin terukur.

Pandangan filosofis dan rencana aksi MEKSI dituangkan dalam kerangka visi, misi, strategi, serta program yang direalisasikan pada lima tahun mendatang. Visi MEKSI 2019-2024 adalah mewujudkan "*Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia*". Berdasarkan visi tersebut, ada empat strategi utama yang akan menjadi acuan para pemangku kepentingan ekonomi syariah yaitu:

1. Penguatan Rantai Nilai Halal (*Halal Supply Chain*)

Strategi utama dalam MEKSI 2019-2024 adalah memperkuat seluruh rantai nilai industri halal di Indonesia, dari hulu ke hilir. Ini dilakukan untuk semua kluster yang menjadi prioritas dan yang diukur dalam peringkat *Global Islamic Economy Report*, serta untuk aspek yang diperlukan oleh perekonomian nasional. Strategi utama untuk menguatkan rantai nilai halal di Indonesia dilakukan melalui lima program utama diantaranya:

- ↳ Membangun halal hub di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah unggulan.

- ↳ Mengembangkan sertifikasi halal yang efektif dan diterima di seluruh dunia.
- ↳ Kampanye gaya hidup halal
- ↳ Program insentif bagi pemain lokal dan global untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan industri rantai nilai halal (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi)
- ↳ Membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerjasama antarnegara.

2. Penguatan Sektor Keuangan Syariah

Sasaran strategi utama kedua ini adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal Indonesia. Dalam waktu bersamaan, strategi ini juga untuk meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan exposure yang lebih luas ke sektor produksi halal. Program utama untuk melaksanakan strategi ini adalah sebagai berikut:

- ↳ Membangun *National Halal Fund* untuk mendukung pertumbuhan industry halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor.
- ↳ Membangun *Islamic Inclusive Financial Services Board* (IIFSB)

“
Visi MEKSI 2019–2024 adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia
”

- ↳ yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara global
- ↳ Integrasi sektor ZISWAF, fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitasnya dalam melayani seluruh segmen produksi.
- ↳ Pengembangan kerangka kerja dan indikator bagi kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi
- ↳ Pembentukan Bank BUMN Syariah

3. Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dalam segi kuantitas, meski secara individu skala ekonomi pelaku UMKM sangat kecil. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja nasional, sehingga sektor ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam memperkuat rantai nilai halal.

UMKM juga merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian indikator atau capaian utama, baik pemerataan, kesejahteraan (*welfare effect*), dan juga kemandirian ekonomi bangsa.

Strategi utama untuk menguatkan UMKM dilakukan melalui empat program utama:

- ↳ Pembentukan program edukasi untuk usaha mikro
- ↳ Fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM
- ↳ Pembangunan *database* UMKM

daya tahan dari persaingan global ini, industri halal nasional harus mengadopsi strategi digital baik dari sisi pembiayaan maupun pemasaran.

Ekonomi dan *platform digital* dapat memperkuat beberapa strategi atau sasaran sekaligus, termasuk UMKM, rantai nilai halal, dan juga capaian skala produksi dan ranking dalam laporan global.

Oleh karenanya, strategi utama untuk pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital adalah sebagai berikut:

- ↳ Pendirian halal marketplace dan sistem pembiayaan syariah
- ↳ Pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan memiliki cakupan global.
- ↳ Sistem informasi yang terintegrasi untuk *traceability* produk halal.

4. Strategi Utama yang Akan Menjadi Acuan Para Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah

Penguatan Sektor Keuangan Syariah

Membangun national halal fund untuk mendukung pertumbuhan industry halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor.

Membangun Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara global.

Integrasi sektor ZISWAF, fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitasnya dalam melayani seluruh segmen produksi.

Pengembangan kerangka kerja dan indikator bagi kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi.

Pembentukan Bank BUMN Syariah.



KEKUATAN DAN TANTANGAN

Ekonomi Syariah Indonesia dan Peran KNKS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Dr.Irfan Syauqi Beik
@irfan_beik

Potensi Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia sangat besar ke depan mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Besarnya komitmen dan dukungan Pemerintah serta banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia menjadi modal bagi Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Bagaimanakah kekuatan dan tantangan ekonomi syariah Indonesia ke depan serta harapan akan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Berikut ini hasil lengkap wawancara tokoh ekonomi syariah Indonesia Dr.Irfan Syauqi Beik dengan M.Quraisy, Ph.D. dari KNKS, beberapa waktu lalu (24/05/19).

1. Bagaimana Anda melihat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia 10 tahun terakhir ini?

Saya pribadi melihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir trend perkembangan Ekonomi Syariah mengalami peningkatan. Secara umum sektor keuangan syariah dalam 10 tahun terakhir tetap tumbuh secara baik. Kemudian dari sisi sektor riil syariah pertumbuhannya cukup signifikan khususnya industri kosmetik halal

dan pariwisata halal. Di sektor ekonomi sosial syariah khususnya bidang zakat dimana pertumbuhan rata-ratanya sekitar 24% per tahun sehingga kualitas pertumbuhan zakat di Indonesia sangat luar biasa.

Namun kalau kita melihat potensi ekonomi syariah dengan kondisi aktual (*performance*) ekonomi syariah maka kita melihat masih ada kesenjangan. Misalnya menurut data *Global Islamic Economy Indicator* 2018/2019, konsumsi makanan halal kita merupakan yang terbesar di dunia namun kita belum mampu berperan sebagai produsen atau eksportir untuk pasar makanan-minuman halal di tingkat global.

Namun ke depan saya optimis Indonesia dapat terus mengupayakan kemampuannya sebagai penyedia produk dan jasa halal tidak hanya untuk memenuhi

“ Pertumbuhan zakat rata-rata sekitar 24% per tahun sehingga kualitas pertumbuhan zakat di Indonesia sangat luar biasa. ”

kebutuhan pasar domestik namun juga untuk pasar internasional.

2. Menurut anda apa yang menjadi kekuatan ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam bersaing di skala global?

Menurut hemat saya kekuatan ekonomi syariah Indonesia terletak pada tiga hal yaitu:

I.Inovasi

Indonesia sangat inovatif dalam bidang keuangan syariah misalnya Indonesia adalah negara yang pertama kali menganalisa sukuk negara ritel dimana hal ini merupakan sebuah terobosan baru. Selain itu di bidang ekonomi syariah, dunia perzakatan kita menjadi referensi dunia Internasional misalnya instrument alat ukur dalam kinerja pengelolaan zakat dan indeks kesejahteraan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diminta dibahas secara khusus oleh negara anggota pada World Zakat Forum 2019. Selain itu inovasi produk ‘zakat saham’ dimana orang bisa membayar zakat dengan saham juga merupakan inovasi baru yang belum ada di negara manapun.

II. Daya Tahan Ekonomi Syariah Indonesia sangat kuat.

Daya tahan ekonomi syariah Indonesia sangat luar biasa

karena Indonesia melakukan pendekatan *bottom-up approach*. Jadi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak menimbulkan ongkos sosial politik yang besar misalnya apabila terjadi pergantian kepemimpinan dalam setiap periode pemerintahan maka kondisi ekonomi syariah Indonesia dapat tetap tumbuh atau *sustainable*. Sehingga beberapa negara dunia Internasional tertarik untuk mengadopsi sistem ekonomi syariah Indonesia yang dalam pengembangannya tidak menimbulkan beban pada sisi biaya sosial politik atau dengan kata lain biaya sosial politiknya rendah.

III. Indonesia memiliki pasar yang sangat besar yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia sebagai the biggest market in Islamic Economy harus dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kita tidak hanya menjadi target pasar bagi negara lain namun juga harus bisa menjadi leading-country atau pelopor dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat global mengingat besarnya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia.

3. Menurut anda, tantangan apa yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dewasa ini?

Menurut saya dewasa ini ada 3 tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah:

I. Tantangan dari sisi pemahaman publik
Literasi keuangan syariah masih sangat rendah termasuk di dalamnya literasi masyarakat tentang sektor riil atau bisnis syariah serta literasi tentang zakat dan wakaf. Ini tantangan kita bersama khususnya dalam memberi pemahaman atau edukasi pada publik tentang pentingnya ekonomi syariah yaitu seperti menjamin keadilan ekonomi, adanya pemerataan



“

Tiga tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia:

1. Pemahaman publik terhadap ekonomi syariah
 2. Tantangan kelembagaan ekonomi syariah yang harus kuat
 3. Dukungan regulasi yang berpihak
- ”

distribusi kekayaan serta sarat dengan nilai-nilai *akhlakul kharimah* sehingga dapat menimbalisir adanya potensi negatif dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti kecurangan (*fraud*) dan asimetri informasi (*asymmetric information*). Adanya unsur keuntungan yang tidak kasat mata (*intangible benefit*) di dalam ekonomi syariah seperti adanya perasaan ketenangan spiritual dan kondisi batin yang semakin baik juga harus selalu dikomunikasikan kepada publik secara berkesinambungan. Selain itu kesadaran publik juga harus diingatkan yaitu bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang inklusif dan bertujuan untuk mensejahterakan manusia tidak hanya untuk umat Islam saja.

II Tantangan dari sisi Kelembagaan
Tantangannya yaitu bagaimana agar kita bisa mewujudkan kelembagaan ekonomi syariah yang lebih baik serta bisa menghadirkan lembaga ekonomi syariah yang kuat seperti misalnya penguanan kelembagaan di sektor keuangan syariah seperti perbankan syariah, serta institusi

keuangan non-bank (IKNB) syariah seperti asuransi syariah (*takaful*), *multifinance* syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah (BMT) dan Lembaga ZISWAF dan juga di sektor riil atau bisnis syariah seperti sektor industri halal. Penguatan kelembagaan ekonomi syariah dapat berperan signifikan dalam menjamin pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Selain itu penguatan dari sisi kelembagaan ini menjadi isu yang sangat krusial khususnya dari aspek Manajemen, aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Teknologi Informasi (IT) dimana hal ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

III. Tantangan dari sisi regulasi
Menurut hemat saya, masih perlu banyak dukungan regulasi yang berpihak kepada ekonomi syariah sehingga regulasi tersebut bisa berdampak signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Misalkan mewajibkan BUMN non-keuangan untuk menyimpan dananya sebesar 30% di perbankan syariah. Atau misalkan lagi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pembayaran Zakat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Bagaimana menurut anda mengenai inovasi-inovasi praktik keuangan syariah ataupun bisnis syariah yang perlu diperkuat untuk menjadi solusi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia?

Inovasi-inovasi praktik keuangan syariah sangat luar biasa apalagi dengan kemajuan teknologi informasi (IT) misalnya saat ini kecenderungan transaksi keuangan mendorong kepada transaksi non-tunai (*cashless transaction*) seperti penggunaan *mobile banking*. Sehingga ini hal ini harus terus kita dorong agar secara kreatif dan inovatif agar

keuangan syariah memanfaatkan hal tersebut. Inovasi lain misalnya dalam bidang perzakatan, seperti inovasi dari sisi penghimpunan zakat di BAZNAS yang mengembangkan platform internal berdasarkan *Artificial Intelligence (AI)* yaitu berupa aplikasi robotik LENA di Google Playstore sehingga muzakki untuk konsultasi 24 jam terkait dengan zakat. Intinya kita harus terus memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan layanan dari lembaga/institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia

5. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai perluasan target roadmap nasional dari keuangan syariah menjadi ekonomi syariah secara menyeluruhan yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024?

Menurut hemat saya perluasan target *roadmap* dari keuangan syariah menjadi ekonomi syariah tersebut sangat baik karena potensi ekonomi syariah yang utama terletak pada sektor riil atau bisnis syariah dan tidak hanya pada sektor keuangan syariah saja. Sehingga saya melihat bahwa perluasan *masterplan* dari keuangan syariah menjadi

ekonomi syariah menurut saya merupakan langkah yang tepat. Namun harapan saya supaya masterplan ini tidak hanya berhenti pada tataran dokumen saja namun agar dapat dieksekusi dan direalisasikan kemudian dapat diimplementasikan sesuai *timeframe* dan *timeline* yang sudah dibuat. Dimana besar harapan saya agar Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dapat berperan optimal dalam mengawal proses tersebut. KNKS juga diharapkan dapat berperan sebagai jembatan antar otoritas sehingga otoritas tersebut dapat didorong agar bisa melaksanakan *quick-wins* yang ada di dalam masterplan tersebut kemudian bisa secara konsisten mengimplementasikan *poin-poin* kebijakan yang ada sehingga antara dokumen *masterplan* dan prakteknya dapat berjalan selaras.

6. Bagaimana menurut anda mengenai langkah eksekusi strategis yang perlu dilakukan oleh berbagai stakeholder ekonomi syariah merujuk pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024?

Koordinasi dan sinergi antar stakeholder harus terus diperkuat karena *masterplan* ini mencakup banyak hal dan melibatkan banyak

Fungsi KNKS

- ⦿ Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.
- ⦿ Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.
- ⦿ Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah.
- ⦿ Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan

Komite Nasional Keuangan Syariah

"Menyatukan langkah, Memajukan Negeri"
dengan mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional

"Pengelolaan Sumber Daya dan Potensi Bangsa"
membuka kesempatan dan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal

"Mencapai Kesejahteraan dan Maqashid Syariah"
dengan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang kuat, sehat dan berkelanjutan serta sesuai maqashid syariah.

"Membangun Kemandirian Ekonomi"
dengan mendorong terbentuknya ekosistem industri halal yang mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional.

pihak (*multi-stakeholders*) serta lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini KNKS dapat berperan sebagai dirigen bagi para *stakeholders* tersebut dengan melakukan pendekatan atau komunikasi yang baik serta sosialisasi yang aktif kepada kementerian dan lembaga terkait agar bisa saling bersinergi dan berkolaborasi sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dapat tercapai.

7. Bagaimana anda melihat peran KNKS ke depan dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia?

Saya melihat KNKS harus dapat berperan sebagai akselerator dari proses pembangunan ekonomi syariah di Indonesia dan agar mampu menjadi pihak yang dapat menjembatani koordinasi serta memperkuat komunikasi internal antar otoritas kementerian-lembaga di Indonesia serta dapat mendorong lahirnya sinergi yang lebih kuat antar kementerian-lembaga tersebut sehingga setiap stakeholder bisa bergerak sesuai dengan masterplan yang kita harapkan.



BERITA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH NASIONAL

PERBANKAN

Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 10,2 M pada 2018 (Januari 2019)



Sumber : www.republika.co.id

Bank Wakaf Mikro (BWM) yang dibentuk sejak Oktober 2017 telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 10,2 miliar pada 2018. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 15 Desember 2018, realisasi pembiayaan tersebut disalurkan oleh 41 BWM di seluruh Indonesia. Pembiayaan diberikan kepada 8.373 nasabah yang terbagi ke dalam 1.676 kelompok usaha nasabah KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). BWM memanfaatkan potensi 28.194 pesantren yang ada di Indonesia. OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis BWM dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk mempertemukan

pihak yang memiliki kelebihan dana dan disalurkan pada masyarakat produktif yang membutuhkan. Menurut data OJK per September 2018, total aset perusahaan LKMS yakni Rp 247,34 miliar. Dengan total pembiayaan sekitar Rp 14 miliar dan rasio likuiditas 110,05 persen. Sementara itu, skema pembiayaan melalui BWM adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil yang dikenakan setara 3 persen. Dalam skema pembiayaan juga disediakan pendampingan bagi kelompok sehingga akan membantu pemberdayaan masyarakat kecil di daerah yang memiliki usaha ultra mikro. (www.republika.co.id)

Ekonomi Melambat, Kinerja Koperasi Syariah Tetap Kuat (Februari 2019)

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional melambat tak membuat kinerja koperasi goyah. Salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. KSPPS BMT UGT Sidogiri mampu membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah zakat dan beban akhir tahun sebesar Rp71,77 miliar. Selain pendapatan SHU yang meningkat dan tetap kuat, jumlah aset KSPPS BMT UGT Sidogiri juga mengalami kenaikan sebesar Rp2,25 triliun. Jumlah aset tersebut menjadikan KSPPS BMT UGT Sidogiri sebagai koperasi syariah terbesar di Indonesia. dan memiliki 18.060 anggota dengan kantor cabang dan cabang pembantu 288unit yang tersebar di Jawa dan luar

Jawa. Selain itu KSPPS BMT UGT Sidogiri memiliki *non-performing financing* (NPF) sebesar 2,61%, *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar 74,13%, *capital adequacy ratio* (CAR) 18,58% dan *return on equity* (ROE) 20,63% di tahun 2017. Untuk mengembangkan pembiayaan kepada para anggota pelaku UMKM, KSPPS BMT UGT juga menjalankan kemitraan dengan berbagai bank syariah. Selain itu, KSPPS BMT Sidogiri juga menyalurkan dana program Ultra Mikro (UMI) Kementerian Keuangan sebesar Rp50 miliar kepada anggotanya hingga saat ini. Banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah bermitra dengan KSPPS BMT UGT Sidogiri membuktikan tingkat kepercayaan kepada BMT UGT Sidogiri tinggi. (www.sindonews.com)



Sumber : www.sindonews.co.id

KEUANGAN NON BANK

KSEI: 60 Persen Saham di BEI Sudah Syariah (Februari 2019)



PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memandang potensi investasi saham syariah pada 2019 masih cukup cemerlang. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat Muslim, hal ini juga diiringi dengan mulai banyaknya masyarakat mengenal model investasi ini. Pasar saham syariah saat ini juga terus berkembang pesat. Terbukti sudah ada 60 persen saham bersifat syariah dari kapitalisasi pasar sebesar Rp 7.000 triliun. Selain itu sistem online trading-nya juga sudah ada 13 SOTS syariah. Bukti lainnya mengenai potensi investasi saham syariah adalah perkembangan Jakarta Islamic Indeks biasanya lebih bagus dari

LQ45. Investasi syariah tidak hanya digemari oleh masyarakat Muslim, tapi juga oleh masyarakat non-Muslim. Alasan tersebut adalah karena saham syariah lebih pruden dan tidak menggunakan bank konvensional, sehingga jika ada gejolak yang rentan bisa diminimalisir. Saat ini ada dua kategori investor syariah. Pertama, investor yang mulai dari broker, rekening hingga saham yang ditransaksikan adalah berbasis syariah. Kedua, investor konvensional yang hanya berinvestasi di saham syariah. (www.liputan6.com)

INDUSTRI HALAL

Gubernur BI Yakin Ekonomi Halal Bisa Makin Berkembang di Indonesia (Februari 2019)



Sumber : www.liputan6.com

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wardjiyo optimis dengan perkembangan ekonomi halal di Indonesia. Menurutnya, perlu dibuat sebuah ekosistem tersendiri agar ekonomi halal dapat terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi halal bisa memanfaatkan beberapa sektor industri yang bisa dilibatkan, seperti kuliner, fesyen, pariwisata, dan juga kosmetika. Ekosistem ekonomi halal harus dikembangkan menjadi ekonomi halal yang berbasis komunitas,

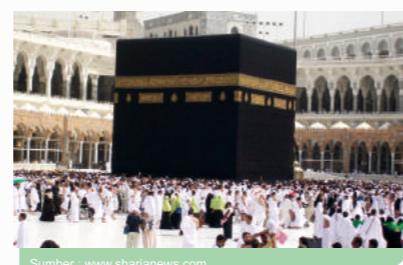
baik pesantren maupun komunitas Muslim, dan juga ekonomi halal yang berbasis industri, apakah komunitas industri kelas menengah ataupun besar. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan ke sana, baik melalui pengembangan ekonomi komunitas, termasuk pesantren maupun sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan berbagai pelaku industri untuk mengembangkan industri halal Indonesia. (www.liputan6.com)

DANA SOSIAL KEAGAMAAN

BPKH: Dana Haji Berhasil Melebihi Target (Januari 2019)

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama tahun 2018, dana haji yang berhasil dikelola oleh BPKH telah melampaui target yakni semula Rp 111 triliun kini mencapai Rp 113 triliun dan jumlah calon Jemaah haji semula ditargetkan 550.000 kini mencapai 664.000 calon jemaah haji. Kenaikan jumlah jemaah haji di tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dana-dana

calon jemaah haji yang terkumpul, selanjutnya dikelola oleh BPKH dengan ditempatkan pada deposito perbankan syariah dan surat berharga syariah, tidak ditujukan untuk infrastruktur. Pada tahun 2018, komposisi investasi dana haji sekitar 50% di bank dan 50% surat berharga. Akan tetapi, untuk tahun 2019, komposisi investasi dana haji ada sedikit perubahan menjadi 50% pada perbankan syariah, 30% untuk surat berharga syariah, dan 20% untuk investasi langsung serta investasi lainnya. Pada tahun 2019, BPKH menargetkan pengelolaan dana haji dapat mencapai Rp 121 triliun dan jumlah calon jemaah haji mencapai 700.000 orang. (www.sharianews.com)



Sumber : www.sharianews.com

BERITA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INTERNASIONAL



PERBANKAN

Bank Syariah Masih Menopang Pertumbuhan Sektor Perbankan Malaysia (Maret 2019)

Keuangan syariah masih menjadi penopang dalam pertumbuhan sektor perbankan Malaysia secara nasional. Perbankan syariah terus berkembang dengan laju yang lebih cepat daripada skema konvensional pada tahun 2018. Pada akhir Januari 2019, pembiayaan syariah terdiri dari sekitar 32% dari keseluruhan sistem peminjaman. Pembiayaan syariah mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

mencapai target Bank Negara Malaysia, yakni sebesar 40% dari keseluruhan pinjaman nasional pada tahun 2020. Walaupun begitu, industri perbankan syariah lebih baik dalam hal *maturity* dan keluasannya. Kapitalisasi perbankan syariah cukup kuat dan profitabilitas akan stabil meskipun ada sedikit pengurangan margin. Deposit sistem perbankan syariah terus berkembang dalam *rate* yang sehat sebesar 12.4% pada tahun 2018. (www.thestar.com.my)



Sumber : www.thestar.com.my

NON-BANK

Pendapatan Tetap: Ramalan Penerbitan Sukuk Wilayah MENA sebesar \$80-85 Miliar untuk 2019 (Januari 2019)



Sumber : www.zawya.com

Jumlah obligasi dan sukuk yang diterbitkan dalam dolar AS di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) diperkirakan mencapai 80-85 miliar USD pada tahun 2019 – hampir sama dengan penerbitan pada tahun lalu sebesar 84 miliar USD berdasarkan kajian terbaru, namun ada potensi untuk meningkat lebih tinggi jika Saudi Aramco mulai perjalannya ke sektor pasar modal dengan penerbitan obligasi perdana senilai 10 miliar USD. Saat banyak sekali penerbitan sukuk, permintaan terpenuhi dengan baik dengan rerata 2-2.5 kali oversubscribed. Permintaan terkait sukuk masih baik, sekitar

50-60% dari kesepakatan yang ada akan ditempatkan di wilayah MENA. Obligasi MENA akan ditambahkan dalam index secara gradual, dimulai dari akhir bulan Januari dan berakhir pada bulan September. Permintaan yang baik ini dikarenakan banyak sekali proyek infrastruktur dan proyek tersebut tentu perlu dibiaya dan wilayah MENA memiliki potensi yang besar akan hal ini. (www.zawya.com)

Pasar Modal Syariah Malaysia Menyusut 0.67 Persen di Tahun 2018 karena Kapitalisasi Pasar Surat Berharga (Maret 2019)

Ukuran pasar modal syariah Malaysia turun sebesar 0.67% menjadi 1.880,73 miliar ringgit (458,69 miliar USD), berdasarkan kalkulasi Salaam Gateway dari data Komisi Sekuritas Malaysia. Selain itu kapitalisasi pasar sekuritas syariah juga turun sebesar 8.58% menjadi 1.036 miliar ringgit dari 1.133,83 miliar ringgit di tahun sebelumnya. Penurunan ini diimbangi oleh kenaikan *outstanding* sukuk sebesar 11,13%. Untuk Sukuk, di tahun 2018 sukuk korporasi anjlok 17,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerbitan sukuk korporasi turun menjadi 68,92% dari 70,19% tahun 2017. Untuk Sektor Dana Syariah (*Islamic Funds*),

Assets Under Management (AuM) syariah turun menjadi 7,74%. Untuk ETFs Syariah, jumlah dana yang diperdagangkan di ETFs syariah naik sebesar 1 poin dari 5 menjadi 6 pada tahun 2018. Persentase kapitalisasi pasar ETFs syariah dibandingkan dengan total industry meningkat menjadi 27,78% dari 24,2% di tahun 2017. Untuk REITs syariah, jumlah *Real Estate Investment Trusts* (REITs) syariah *flat* di angka 4. Namun, kapitalisasi pasar turun 9.86% menjadi 17,19 miliar ringgit. Secara keseluruhan, REITs syariah mempunyai proporsi 41,49% dari REITs Malaysia secara keseluruhan, naik dari 41,02% di tahun 2017. (www.salaamgateway.com)

Sumber : www.salaamgateway.com

INDUSTRI HALAL

Eksport Halal Malaysia Meningkat 4-5 Persen Tahun Ini (Januari 2019)

Eksport halal Malaysia diperkirakan akan meningkat 4-5 persen dari 43 M ringgit Malaysia (\$ 10,5 miliar) pada 2017. Proyeksi ini didasarkan pada tiga faktor yakni pada pertumbuhan populasi Muslim secara global, upaya berkelanjutan oleh Usaha Kecila dan Menengah (UMKM) setempat untuk menghasilkan lebih banyak produk dan layanan halal, dan

upaya kolaborasi dari kementerian dan mitra asing. Selain itu, pada tahun 2020, Malaysia menargetkan eksport halal scara nasional mencapai 50 miliar ringgit, meskipun ada ketidakpastian ekonomi global termasuk volatilitas ringgit dan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2017, pertumbuhan eksport halal Malaysia melambat menjadi 2.6 persen pada 2017 dari kenaikan 7.36 persen pada 2016. (www.salaamgateway.com)

Sumber : www.salaamgateway.com

UEA Meluncurkan Integrated 'Arab System' Untuk Pengakuan Sertifikat Halal (Februari 2019)

Otoritas Emirates untuk Standarisasi dan Metrologi (ESMA) dan Organisasi Pengembangan dan Pertambangan Industri Arab (AIDMO) telah mengembangkan program baru yang saling terintegrasi untuk meningkatkan perdagangan produk halal di TimurTengah dan Afrika Utara. Program baru ini merupakan sertifikasi halal yang saling terintegrasi diantara negara-negara Arab dan diluncurkan di Dubai. Program baru ini juga akan terdiri dari aturan dan prosedur untuk sertifikat dan tanda halal di seluruh wilayah baru, yang akan diperkenalkan di negara-negara Arab yang tertarik sebagai label

Sumber : www.salaamgateway.com

opsional. Perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat dan label halal Arab dapat menerapkan langsung ke otoritas halal di negara Arab mana pun yang mengontrak AIDMO. AIDMO yang berbasis di Maroko beroperasi dalam lingkup Liga Negara-negara Arab, yang lebih dikenal sebagai Liga Arab. 22 negara anggotanya merupakan bagian dari Liga Arab. Program halal Arab juga dikembangkan untuk memastikan kepatuhan produsen dan pemasok dengan standar halal di dunia Arab dan melindungi konsumen dari produk halal palsu atau mereka yang menggunakan label halal palsu. (www.salaamgateway.com)

DANA SOSIAL KEAGAMAAN

Keuangan Sosial Islam: Kemitraan untuk Kemanusiaan Masa Depan? (Februari 2019)

Keuangan sosial Islam telah menunjukkan potensi yang sangat besar sebagai alat keuangan yang efektif untuk mencapai keadilan ekonomi, kemakmuran bersama, dan partisipasi inklusif. Melalui *Zakat*, *Shadaqah*, dan *Wakaf*, yang berasal dari prinsip-prinsip filantropi Islam dan termasuk perilaku pemberian standar untuk memenuhi kebutuhan kaum pra-sejahtera. Pada tahun 2018, dengan sekitar penduduk muslim secara global mencapai 1.6 M, *Islamic Development Bank* memperkirakan potensi zakat ini mencapai \$ 1 triliun. Dalam Gerakan Palang Merah Bulan

Sabit Merah, *The British Red Cross* dengan Federasi Internasional Palang Merah dan Masyarakat Bulan Sabit Merah (IFRC), telah membentuk Tim Keuangan Inovatif Global (GIFT) bekerjasama dengan para pakar keuangan Islam terkemuka untuk mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan mengenai keuangan *sosial*/Islam di seluruh dunia untuk menolong kaum termarginalkan. Hal ini adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. (www.bond.org.uk)

Sumber : www.republika.co.id



MENTERI BAPPENAS MINTA PEJABAT KNKS LANGSUNG KERJA "FULL" USAI DILANTIK



Januari 2019 - Sumber : www.ekonomi.kompas.com

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah melantik para pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang terdiri dari satu direktur eksekutif dan lima direktur. Setalah pelantikan ini, diharapkan para pejabat tersebut dapat bekerja secara full. Para pejabat yang dilantik diantaranya Ventje Rahardjo Soedigno selaku Direktur Eksekutif; Taufik Hidayat selaku Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah; Ronald Rulindo selaku Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalamian Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah; Ahmad Juwaini selaku Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah; Sultan Emir Hidayat selaku Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah; serta Afdhal Aliasar selaku Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal.

BUMN DAN KNKS DUDUK BARENG BAHAS PEMBENTUKAN BANK SYARIAH SKALA BESAR



Februari 2019 - Sumber : www.merdeka.com

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan melakukan pembentukan bank syariah skala besar, yang mana telah masuk ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebagai peta arah peta pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang telah disepakati dalam Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Presiden pada 5 Februari 2018 lalu. Pertemuan antara KNKS dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN sudah dilakukan untuk membahas hal tersebut. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, pembentukan bank BUMN Syariah skala besar merupakan salah satu *quick wins* sektor keuangan syariah. Untuk mewujudkan hal tersebut, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan dan masih banyak tantangan serta rintangan salah satunya adalah untuk membentuk bank bumn syariah skala besar operasional bank-bank yang terlibat harus berdiri sendiri bukan merupakan anak usaha dari bank konvensional.

KNKS DORONG PEMBENTUKAN DATABASE WAKAF NASIONAL



Maret 2019 - Sumber : www.knks.go.id

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong pembentukan database wakaf nasional. Database ini berisi seluruh aset wakaf di Indonesia yang terintegrasi. Platform ini menunjukkan transparansi dan nantinya akan bisa diakses oleh siapa pun. KNKS selanjutnya akan membangun kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, lembaga nadzhir, Kementerian Agama dan lainnya untuk melancarkan program tersebut. KNKS mendorong agar Indonesia memiliki Lembaga Managemen Pengelolaan Aset Umat yang mirip dengan lembaga managemen aset negara. Hal ini dilakukan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih professional dan strategi pemanfaatan wakaf dapat menjadi lebih efektif serta meningkatkan transparansi untuk para wakif. Kementerian Agama mencatat total tanah wakaf berjumlah sekitar 4 juta m² atau sekitar Rp2000 triliun. Untuk memproduktifkan aset-aset tersebut, perlu integrasi data agar pengembangannya maksimal, sehingga nadzhir bisa mengelola aset yang berbeda dengan nadzhir lainnya. Untuk menunjang model manajemen wakaf yang professional, kemampuan nadzhir juga perlu ditingkatkan.



KNKS SELENGGARAKAN IIEFEST 2019

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyelenggarakan acara bertajuk Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) yang diresmikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). IIEFest merupakan acara pertama bagi KNKS sejak jajaran manajemen eksekutif terbentuk pada Januari 2019 lalu. Acara IIEFest tahun ini diselenggarakan sebagai acara Pra-Launching Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Tujuan diselenggarakannya IIEFest 2019 adalah untuk memperkenalkan industri halal di Indonesia kepada masyarakat, sekaligus sebagai bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup halal. Acara ini mendatangkan para pelaku pasar dari berbagai industri kreatif syariah sebagai narasumber talkshow sebagai upaya KNKS dalam memberikan informasi potensi usaha di industri halal. Dalam rangkaian acara ini juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman sebagai tindak nyata terhadap penerapan ekonomi syariah antar pelaku industri keuangan syariah diantaranya BRI Syariah dan Paytren, serta Ammana Fintek dengan BMT Jawa Barat, PBMT Ventura, dan Laznas Al-Azhar. Untuk rencana kedepan, acara serupa akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia pada waktu mendatang.



April 2019 - Sumber : www.sharianews.com

PRESIDEN LUNCURKAN MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH PERTAMA DI INDONESIA



Mei 2019 - Sumber : www.knks.go.id

Sela 14 Mei 2019, Presiden Republik Indonesia beserta Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 di Gedung Bappenas. MEKSI 2019-2024 diharapkan dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia yang selanjutnya dapat menjadi program kerja implementatif pemerintah. Dalam rangkaian Acara Peluncuran MEKSI 2019-2024, KNKS juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan berbagai Lembaga dan pelaku industri, diantaranya dengan Mandiri Syariah; BRI Syariah; BNI Syariah; BTN Syariah; PT Finarya (LinkAja); Bukalapak; Tokopedia; BPJS Ketenagakerjaan; CFO Club; Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor; Universitas Airlangga; UIN Jakarta; UIN Ar-Raniry; STEI Tazkia; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.